



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2018

Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian



<https://kominfo.kotabogor.go.id/>



Komplek Balai Kota Bogor
Jl. Ir. H. Juanda No 10 Bogor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2018.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sehingga diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan daripencapaian kinerja, visi, misi, dan realisasi pencapaian indikator kinerja serta sasaran dengan target yang telah ditetapkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan menginformasikan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi sepanjang Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota

Bogor Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2018.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam menyusun strategi kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pelaksanaan *e-Government* di Kota Bogor.

Bogor, Desember 2018
Kepala Dinas,

Drs. Firdaus, M.Si
NIP. 19671226 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI	2
C. DASAR HUKUM	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN KINERJA.....	7
B. PERJANJIAN KINERJA	10
C. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR TAHUN 2017	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA	15
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	34
BAB IV PENUTUP	36

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemanfaatan Informasi dan Komunikasi telah menjadi tren baru bahkan merambah kepada tata kelola pemerintahan, bahkan dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan *e-Government*. Dengan data pemerintahan yang dikelola secara elektronik diharapkan teknik pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

Pemerintah daerah berperan secara optimal dengan berusaha melakukan akselerasi dengan memanfaatkan teknologi dalam menyikapi kondisi kekinian dengan menerapkan konsep *smart city*.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor merupakan salah satu dinas yang menangani urusan wajib dibidang komunikasi dan informatika yang mempunyai peran strategis sebagai leading sektor dalam implementasi *smart city* berusaha mewujudkan komitmen, peran dan pengabdian dalam mendorong percepatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi tata kelola pemerintah daerah serta memberi layanan prima kepada masyarakat dan menjadikan Kota Bogor sebagai *smart city* sebagai upaya peningkatan layanan terhadap masyarakat.

Keberadaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor ditujukan untuk percepatan penyampaian informasi dan mendukung pelayanan publik melalui pengembangan TIK, dengan menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur secara bertahap, pengembangan aplikasi, penyebaran informasi publik, bimbingan teknis Sumber Daya Manusia dan kajian kelembagaan serta melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan Misi Pertama Kota Bogor, yaitu "*Mewujudkan Bogor Kota yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi*".

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor termasuk ke dalam Dinas Tipe A yang terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
3. Seksi Kemitraan Media Publik;

d. Bidang Teknologi Informasi, membawahkan:

1. Seksi Infrastruktur Jaringan;
2. Seksi Infrastruktur Pusat Data;
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;

e. Bidang Layanan e-Government, membawahkan:

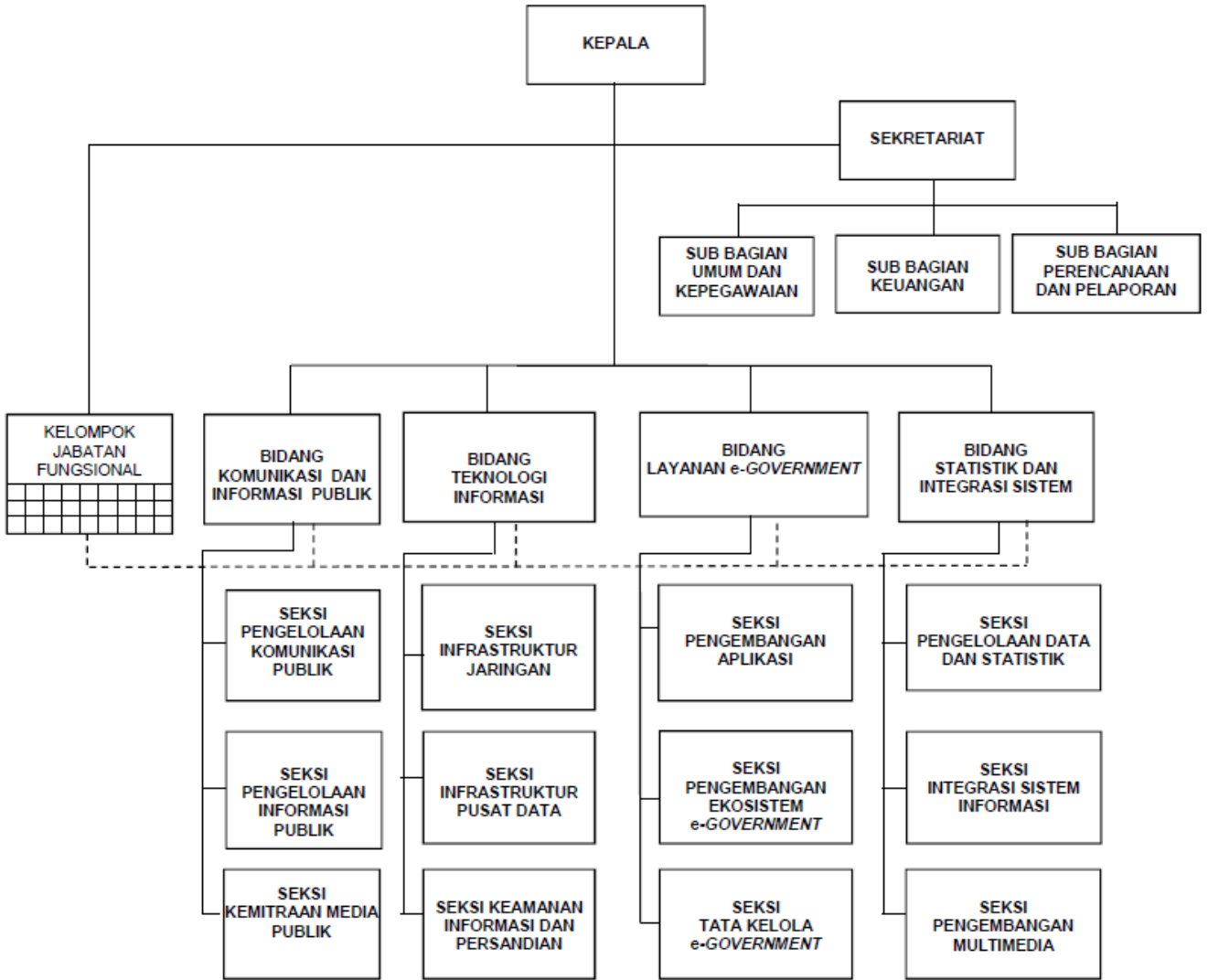
1. Seksi Pengembangan Aplikasi;
2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
3. Seksi Tata Kelola e-Government;

f. Bidang Statistik dan Integrasi Sistem, membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
2. Seksi Integrasi Sistem Informasi;
3. Seksi Pengembangan Multimedia;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 (Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor)



Gambar 2.1.
 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

a. Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. Pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Rencana Strategis 2015-2019. Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan dalam pencapaian tata kelola *e-Government* dan *Smart City* untuk mewujudkan misi pertama Kota Bogor.

A.1. Visi dan Misi

Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tidak terlepas dari visi Pemerintah Kota Bogor yaitu *"Kota Bogor yang Nyaman, Beriman, dan Transparan"*.

Penetapan visi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor berdasarkan pada tugas dan fungsi dinas yaitu "Pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian". Dalam kurun waktu 2015-2019 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan panduan dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan.

1. Visi

Berdasarkan uraian diatas, visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor yaitu:

"Terwujudnya Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk peningkatankinerja aparatur dan pelayanan prima bagi masyarakat"

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dinas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dengan mengacu pada Misi Kesatu Pemerintah Kota Bogor yaitu *"Mewujudkan Bogor Kota yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi"*.

Dalam mendukung Misi Kesatu tersebut, maka disusunlah misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor sebagai berikut :

Misi 1 : *Mewujudkan lingkungan masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan dinamis dalam persaingan lokal dan global dengan wawasan TIK;*

Misi 2 : *Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.*

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2015-2019 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kinerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai berikut:

MISI 1. Mewujudkan lingkungan masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan dinamis dalam persaingan lokal dan global dengan wawasan TIK.

Tujuan 1.1. : Peningkatan kualitas *smart government*

Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (*smart governance*)

Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK

Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya integrasi data sistem informasi

MISI 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

Tujuan 2.1. : Pengembangan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi

Tujuan 2.2. : Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

A.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		STRATEGI	KEBIJAKAN
1.1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (<i>smart governance</i>)	Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan <i>e-government</i> pada layanan publik	Penetapan regulasi dan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan <i>e-government</i>
1.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK	Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur TIK yang berkualitas	Standarisasi prasarana dan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
1.1.3	Meningkatnya integrasi data sistem informasi	Melakukan pengelolaan Sistem Informasi yang terintegrasi	Mengembangkan Sistem Informasi terintegrasi yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat
2.1.1	Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui peningkatan layanan saluran informasi dan komunikasi publik	Pemanfaatan saluran informasi dan komunikasi publik sebagai sarana aspirasi masyarakat
2.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

Tabel 4.3

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Wali Kota Bogor dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor untuk mewujudkan target kinerja melalui pelaksanaan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian baik berupa hasil ataupun manfaat.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota dan Kepala Dinas atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

C. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (smart governance)	indeks e-government	3,21	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	
				Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD	57.500.000
				Integrasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan e-Government Pemerintah Kota Bogor	115.000.000
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
				Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	1.516.750.000
				Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	50.000.000
				Penyusunan Regulasi TIK (Perwali, SOP)	72.850.000
				Penyelenggaran Ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity	83.525.000
				Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	37.499.800

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK	Persentase Penyediaan infrastruktur Jaringan Internet dan intranet menggunakan Fiber Optik	68%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
				Pengadaan BANDWIDTH	3.000.000.000
				Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor	787.760.000
				Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	1.100.000.000
				Pemeliharaan Wifi Ruang Publik	75.000.000
				Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan	75.000.000
				Pembangunan Wifi Ruang Publik	100.000.000
				Pengadaan Infrastruktur Data Center	300.000.000
				Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center	400.000.000
				Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	200.000.000
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah	115.000.000
			Persentase CCTV yang diintegrasikan	90%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
			Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor	377.000.000	
3	Meningkatnya integrasi data sistem informasi	Persentase Integrasi Data SIM	18,45	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
				Pengembangan dan Pembuatan repository / data Warehouse	50.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
				Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room	366.414.000
				Digitalisasi Profil Kota Bogor	50.000.000
				Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA)	85.600.000
				Workshop penyusunan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	40.000.000
4	Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti PD Terkait	65%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
				Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan	140.904.000
				Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan	182.248.000
				Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	68.850.000
				Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat	341.200.000
				Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	50.000.000
				Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik	73.650.000
				Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi	40.000.000
				Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik	80.000.000
				Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat	100.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
				Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	
				Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	45.000.000
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas	B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%		
				Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	45.800.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
				Pengelolaan Rumah Tangga OPD	247.120.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
				Pengadaan Inventaris Kantor	700.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	300.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor yang merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian sasaran menurut indikator yang telah ditetapkan kami uraikan sebagai berikut :

MISI 1. Mewujudkan lingkungan masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan dinamis dalam persaingan lokal dan global dengan wawasan TIK.

Tujuan 1.1. : Peningkatan kualitas *smart government*

Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (*smart governance*)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
indeks e-government	3,21	3,03	94,4%

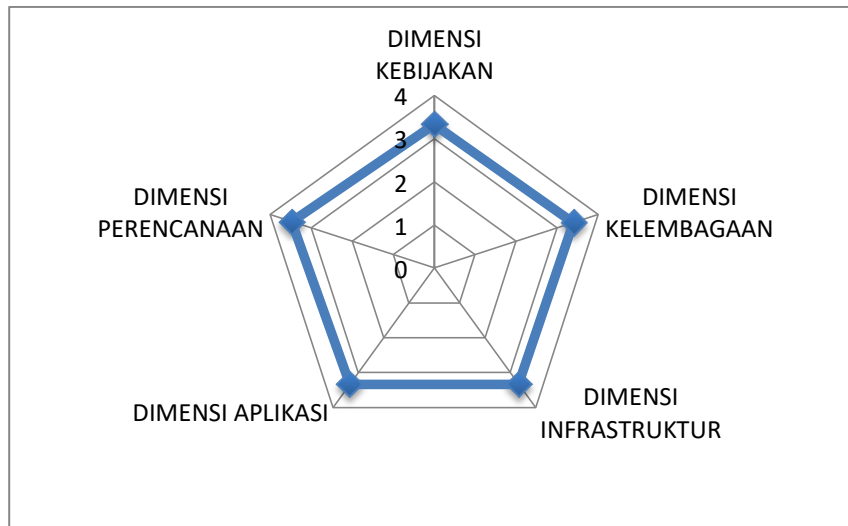
1. Penjelasan hasil Penilaian Indeks e-Government

Hasil *Assesment* Kota Bogor Tahun 2018 oleh Tim Assessor Kemkominfo menunjukkan hasil pemeringkatan *e-Government* dengan nilai rata-rata seluruh dimensi adalah **3,03 (tiga koma nol tiga)** dan termasuk dalam **kategori BAIK**.

Kab / Kota	Dimensi					Rata-rata
	Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan	
Kota Bogor	3.13	2.88	2.90	3.25	3.00	3.03

Tabel Hasil Pemeringkatan Kota Bogor

Penilaian ini dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari hasil pemaparan peserta asesmen dan penggalian asesor selama pelaksanaan asesmen. Disamping itu penilaian juga mengacu pada indikator yang tersedia pada saat penilaian dilaksanakan.



Gambar Grafik Lima Dimensi Kota Bogor

Adapun pemberian peringkat di masing-masing dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$3,50 \leq \text{SANGAT BAIK} \leq 4,00$

$2,50 \leq \text{BAIK} < 3,50$

$1,50 \leq \text{KURANG} < 2,50$

$1,00 \leq \text{SANGAT KURANG} < 1,50$

Berikut ini diuraikan penilaian penerapan e-Government pada Kota Bogor berdasarkan masing-masing dimensi.

✓ **Kebijakan**

Hasil asesmen pada saat penilaian untuk dimensi Kebijakan secara umum menunjukkan hasil yang BAIK. Indikasi penilaian baik diawali dengan adanya dukungan pimpinan daerah yang tertuang dalam visi Kota Bogor yang mengedepankan transparansi dalam proses pemerintahan. Proses ini didukung oleh pemanfaatan TIK agar pemerintahan berjalan efektif dan terintegrasi. Pemanfaatan TIK merupakan salah satu strategi yang diprioritaskan untuk mengeksekusi kebijakan yang ingin menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan TIK. Misi ini memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan efektif dan efisien. Dukungan terhadap misi ini direalisasikan dengan kebijakan, misalnya Peraturan Wali Kota yang diikuti oleh pembuatan SOP.

Pemerintah Kota Bogor sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi yang mencerminkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya TIK bagi masyarakat dan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena baru diterbitkan, program dalam perda ini belum diimplementasikan apalagi dievaluasi. Tetapi melihat cara Pemerintah Kota Bogor melakukan evaluasi terhadap program sebelumnya, patut diapresiasi karena sudah mencerminkan independensi.

✓ **Kelembagaan**

Hasil asesmen pada saat penilaian untuk dimensi Kelembagaan secara umum menunjukkan hasil yang BAIK. Pengelola TIK di daerah ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor tanggal 1 November 2016. Kota Bogor di tahun 2018 ini sudah memiliki sekaligus sudah menerapkan 5 (lima) SOP, yaitu SOP Pengamanan Data, SOP Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet, SOP Pemutakhiran Data Web Kota Bogor, SOP Penerimaan Surat melalui Webmail, SOP Pengembangan Web Kota Bogor. Dinas ini memiliki SDM 23 (dua puluh tiga) orang PNS ditambah dengan 14 (empat belas) orang tenaga alih daya. Tidak jauh berbeda kondisi di tahun 2018 ini dengan kondisi pada tahun 2017.

✓ **Infrastruktur**

Hasil asesmen pada saat penilaian untuk dimensi Infrastruktur secara umum menunjukkan hasil yang BAIK. Kota Bogor memiliki ruang server yang digunakan untuk penempatan data dan aplikasi pemerintahan yang dikelola dengan cukup baik, meskipun lokasi penempatan ruang server masih belum disebut layak.

✓ **Aplikasi**

Hasil asesmen pada saat penilaian untuk dimensi Aplikasi secara umum menunjukkan hasil yang BAIK. Daerah ini perlu diapresiasi atas situs web-nya yang menarik, dinamis, selalu dijaga kekiniannya dan dipelihara secara mandiri. Situs web yang ada juga terintegrasi dengan aplikasi Pakar Report LPSE, SIM Perizinan dan SIM Pajak Online. Kota Bogor telah memiliki 12 aplikasi untuk fungsi pelayanan publik, enam aplikasi untuk administrasi dan manajemen umum, JDIH untuk administrasi legislasi, tiga aplikasi untuk manajemen pembangunan, empat aplikasi untuk manajemen keuangan dan SIMPEG untuk manajemen kepegawaian. Dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat penambahan dua aplikasi baru di fungsi Pelayanan Publik. Hampir seluruh aplikasi adalah aplikasi *open source*. Daerah ini juga perlu diapresiasi karena telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi dimana di dalamnya tertuang bahwa setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan sistem elektronik yang memiliki data dan informasi untuk keperluan internal Perangkat Daerah wajib berbagi data/informasi dengan Perangkat Daerah lain di dalam Pemerintah Daerah melalui berbagi data berbasis pengamanan informasi. Salah satu bentuk implementasi kewajiban berbagi data/informasi tersebut adalah pengembangan Sitanduk (Sistem Informasi Manajemen Data Kependudukan) yang menyediakan web service (layanan web) bagi aplikasi lainnya yang membutuhkan data penduduk.

✓ **Perencanaan**

Hasil asesmen pada saat penilaian untuk dimensi Perencanaan secara umum menunjukkan hasil yang BAIK. Di akhir tahun 2018 ini, menandai perlunya peremajaan terhadap dokumen 'Rencana Induk Pengembangan e-Government 2014-2018. Untuk itu perlu dilakukan review terhadap

dokumen tersebut untuk dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik, kegiatan yang sedang dilaksanakan dan kegiatan yang belum dilaksanakan. Daerah ini layak diapresiasi karena telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi yang juga memberikan perhatian kepada aspek Perencanaan dimana ditekankan bahwa Penyelenggaraan e-Government mengacu pada rencana induk *e-Government* yang disusun setiap lima tahun dan ditinjau ulang paling lambat dua tahun sekali. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Induk dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

2. Analisis Penyebab kegagalan mencapai target tahun ini

Tahun ini terjadi peningkatan nilai indeks yang cukup signifikan walaupun belum mencapai target sesuai dengan harapan. Ada beberapa kekurangan dari Kota Bogor yang harus menjadi catatan dan perlu kita buat perbaikan di tahun ini maupun di tahun depan. Beberapa adalah saran perbaikan yang perlu dilakukan:

✚ Saran perbaikan untuk dimensi Kebijakan adalah :

Menyiapkan dokumen dasar tentang penyelenggaraan sistem elektronik sebagai bahan bacaan untuk mengurangi perbedaan pengetahuan yang diakibatkan tingginya perputaran SDM di Kominfo, sehingga organisasi bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Membuat program yang melibatkan beberapa OPD. Kolaborasi ini akan membawa dampak yang lebih besar dibandingkan dengan program yang dibuat oleh OPD sendirian. Kolaborasi ini perlu dilengkapi dengan tanggungjawab OPD yang terlibat, strategi menjaga keberlangsungannya, mitigasi risiko kegagalan, dan indikator keberhasilan. Mengikutsertakan inspektorat dalam evaluasi internal

✚ Saran perbaikan untuk dimensi Kelembagaan adalah :

Mengefektifkan organisasi pengelola TIK dengan memposisikan kepala dinas kominfostandi yang berperan dan berfungsi sebagai GCIO Kota Bogor dan mesti didukung oleh produk hukum yang berfungsi secara utuh yang memberikan kewenangan sebagai koordinator pengembangan sistem

layanan berbasis elektronik dan manajemen teknologi informasi lintas sektor di Kota Bogor. Memperbanyak program penguatan kompetensi SDM baik yang diselenggarakan oleh internal Kota Bogor maupun yang diselenggarakan oleh eksternal, baik level nasional maupun internasional. Kuatnya SDM TIK Kota Bogor menjadi salah satu kunci keberhasilan serta menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mewujudkan layanan yang berkualitas di Kota Bogor.

✚ Saran perbaikan untuk dimensi Infrastruktur adalah:

Penyediaan Ruang Server yang Layak, pemindahan ke tempat yang lebih baik dan melengkapi fasilitas pendukungnya perlu disegerakan mengingat beban kerja yang terus meningkat dari berbagai aplikasi strategis. Penyediaan layanan pusat penanggulangan bencana (DRC) di tempat lain untuk menjaga keberlangsungan sudah dilakukan dengan kerja sama BPPT dan Bonet. Disarankan dikaji ulang efektivitas dari pengaturan DRC yang ada dan dibuatkan satu dokumen rencana menjaga keberlangsungan (*Business Continuity Plan*). Kota Bogor sudah memiliki jaringan data yang melayani 70 (tujuh puluh) titik dengan serat optik dan 70 (tujuh puluh) titik dengan radio/Wireless. Titik titik penting yang masih terjangkau dengan radio/WIFI secara bertahap disarankan dihubungkan dengan kabel FO agar lebih handal. Saran lainnya melanjutkan strategi penggunaan dua ISP berbeda dengan pola bagi beban (*load balancing*) untuk memastikan terjaganya keberlangsungan layanan internet dengan juga menjaga efisiensi. Selain itu juga direkomendasikan untuk melengkapi SOP bagi pengoperasian seluruh infrastruktur teknologi informasi agar manajemen layanan TI kedepan dapat dilakukan dengan lebih baik.

✚ Saran perbaikan untuk dimensi Aplikasi adalah :

Untuk itu pada dimensi ini disarankan untuk terus memperbanyak dan memperluas implementasi berbagi data/informasi sekaligus menindaklanjuti pasal-pasal berikutnya dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018, untuk menyimpan seluruh data dalam pusat data dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi. Selain itu juga perlu mulai menyusun standardisasi data dalam bentuk pengembangan metadata untuk memudahkan kegiatan berbagi data/informasi.

✚ Saran perbaikan untuk dimensi Perencanaan adalah :

Dalam pembuatan rencana pengembangan *e-government* perlu lebih melibatkan partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi dan juga melibatkan peran aktif dari setiap perangkat daerah dengan memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur dan realistis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Penjelasan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, disertai analisis penyebab terjadinya peningkatan / penurunan kinerja

Diskominfostandi Kota Bogor tahun 2018 kemarin telah memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2018 telah disahkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi (Perda Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2018) yang memberikan perhatian kepada aspek Perencanaan dimana ditekankan bahwa Penyelenggaraan *e-Government* mengacu pada rencana induk *e-Government* yang disusun setiap lima tahun dan ditinjau ulang paling lambat dua tahun sekali. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Induk dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (apabila ada)

Sampai saat ini Standar Nasional untuk Pengembangan IT belum ada.

5. Analisis program dan kegiatan atau upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Diskominfostandi dalam rangka mencapai kinerja selama tahun 2018 adalah :

- Pengadaan Bandwidth;
- Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (*Backbone*) Kota Bogor;

- Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota;
- Pemeliharaan Wifi Ruang Publik;
- Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan;
- Pengembangan dan Pengelolaan e-Government;
- Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor;
- Pengembangan dan Pembuatan repository / data Warehouse;
- Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room;
- Digitalisasi Profil Kota Bogor;
- Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan;
- Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan;
- Pengadaan Infrastruktur Data Center;
- Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center;
- Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA);
- Workshop penyusunan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah;
- Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat;
- Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
- Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik;
- Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi;
- Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian;
- Penyusunan Regulasi TIK (Perwali, SOP);
- Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor;
- Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik;
- Pembangunan Wifi Ruang Publik;
- Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat;
- Penyelenggaran Ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity;
- Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik;
- Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD;
- Integrasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan e-Government Pemerintah Kota Bogor;
- Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat.

6. Alternatif solusi untuk mencapai target pada tahun 2019

Solusi untuk meningkatkan nilai Indeks e-Government Kota Bogor Tahun 2019 diantaranya dengan:

- Adanya produk hukum dan dokumen resmi yang bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK
 - Payung hukum terkait Pengembangan IT di Kota Bogor
 - Pembuatan Masterplan Pengembangan e-Government Kota Bogor Tahun 2020 - 2024
- Keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK
 - Adanya organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi Chief Information Officer (CIO)
 - Adanya program pengembangan SDM TIK yang terencana dan terlaksana
- Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari :
 - Data Center dan aplikasi pendukungnya
 - Fasilitas pendukung seperti AC, UPS, Genset serta sarana pengamanan fasilitas lainnya
 - Dokumen Disaster Recovery yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem
 - Pemeliharaan Infrastruktur TIK
 - Inventarisasi peralatan TIK
- Pengembangan Aplikasi-aplikasi yang mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan, yang terdiri antara lain :
 - Pelayanan Publik
 - Administrasi dan Manajemen Umum
 - Administrasi Legislasi
 - Manajemen Pembangunan
 - Manajemen Keuangan
 - Manajemen Kepegawaian

Tujuan 1.1. : Peningkatan kualitas *smart government*

Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyediaan infrastruktur Jaringan Internet dan intranet menggunakan Fiber Optik	68%	63,8%	93,9%

Penyediaan infrastuktur jaringan internet dan intranet Kota Bogor dititik beratkan pada pengadaan jaringan *Fiber Optik* (FO) yang telah dilaksanakan secara bertahap dimana jaringan *Fiber Optik* (FO) ini adalah untuk mengganti *wireless* yang selama ini rentan terhadap cuaca dan lebih menstabilkan jaringan intranet dan internet. Adapun penyediaan infrastruktur jaringan yang terpasang sampai dengan tahun 2018 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) titik jaringan fiber optik dari rencana pemasangan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) titik yang terkoneksi internet di Kota Bogor sampai tahun 2019. Adapun 83 (delapan puluh tiga) titik yang telah terpasang diantaranya sebagai berikut:

No	Titik FO
Tahun 2015	
1	Kecamatan Bogor Barat
2	Kelurahan Cilendek Barat
3	Kelurahan Cilendek Timur
4	Kelurahan Gunung Batu
5	Kelurahan Pasir Jaya
6	Kelurahan Pasir Kuda
7	Kelurahan Pasir Mulya
8	Kecamatan Bogor timur
9	Kecamatan Bogor Utara
10	Kelurahan Cimahpar
11	Kelurahan Tegal Gundil
12	Kecamatan Bogor Selatan
13	Kelurahan Batu Tulis
14	Kelurahan Cipaku
15	Kelurahan Empang
16	Kecamatan Bogor Tengah
17	Kelurahan Babakan Pasar
18	Kelurahan Cibogor
19	Kelurahan Kebon Kalapa
20	Kelurahan Pabaton
21	Kelurahan Paledang

No	Titik FO
22	Kelurahan Panaragan
23	Kecamatan Tanah Sareal
24	Kelurahan Kayumanis
25	Kelurahan Kedung Badak
26	Kelurahan Kedung Jaya
27	Kelurahan Sukadamai
28	Kelurahan Tanah Sareal
29	Dinas Pendidikan
30	Dinas Kesehatan
31	Dinas Sosial (ex Disnakersos)
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (ex BPLH)
33	Dinas Ketahanan Pangan
34	Dinas Lingkungan Hidup
35	Dinas Pemuda dan Olahraga
36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
41	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (ex BPMKB)
42	Dinas Perhubungan (DLLAJ)
43	Dinas KUKM
44	Dinas Pertanian
45	Dinas Perumahan dan Permukiman
46	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
47	Badan Perencanaan Keuangan Daerah
48	Inspektorat
49	PD Pasar (BTS)
50	DPMPSTSP
51	Diskominfostandi
52	RSUD
53	Satpol PP (Satpol PP Kayumanis)
54	Puskesmas Tanah sareal
55	Puskesmas Bogor Selatan
56	Puskesmas Bogor Timur
57	Puskesmas Bondongan
58	Puskesmas Bogor Tengan
59	Puskesmas Bogor Utara
60	Puskesmas Gang Aut
Tahun 2016	
1	Kelurahan Sindang Rasa
2	Kelurahan Sindang Sari

No	Titik FO
3	Kelurahan Tajur
4	Kelurahan Cibuluh
5	Kelurahan Ciparigi
6	Kelurahan Kedung Halang
7	Kelurahan Harjasari
8	Kelurahan Muarasari
9	Kelurahan Pakuan
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Satpol PP Padjajaran
Tahun 2017	
1	Kelurahan Ciluar
2	Kelurahan Bondongan
3	Kelurahan Menteng
4	Kelurahan Lawang Gintung
5	Kelurahan Gudang
6	Kelurahan Curug Mekar
Tahun 2018	
1	Kelurahan Kebon Pedes
2	Kelurahan Loji
3	Kelurahan Genteng
4	Kelurahan Baranangsiang
5	Kelurahan Sempur
6	Puskesmas Cipaku

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase CCTV yang diintegrasikan	90%	90%	100%

Dalam rangka mewujudkan Misi Kota Bogor untuk menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi, penerapan teknologi pemantauan kondisi kota menggunakan CCTV merupakan hal yang penting. CCTV yang dipasang di lingkungan Kota Bogor bertujuan untuk melaksanakan pemantauan secara real time sehingga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi warga Kota Bogor.

Untuk menunjang layanan CCTV diperlukan jaringan yang terintegrasi, media penyimpanan, media analitic, monitor, serta aplikasi integrasi. Saat ini CCTV Kota Bogor dapat diintegrasikan di Aplikasi SIMATA yang terdapat di Bogor Green Room.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor sampai dengan tahun 2018 sudah melakukan pemasangan serta pemeliharaan perangkat CCTV terintegrasi sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit CCTV di lingkungan Balaikota dan Luar Balaikota Bogor, dan terintegrasi dengan:

a. CCTV Dinas Perhubungan sebanyak 15 (lima belas) unit

1. Pajajaran;
2. Tugu Kujang;
3. Pasar Bogor;
4. Underpass (1);
5. Underpass (2);
6. Pancasan;
7. Gunung Batu;
8. Jembatan Merah;
9. Taman Topi;
10. Paledang;
11. Simpang Ciawi;
12. Sukasari;
13. Depan Terminal;
14. Suryakencana(1);
15. Suryakencana(2).

b. CCTV Polresta Bogor sebanyak 5 (lima) unit

1. Pintu Kebun Raya 3;
2. Pintu Kebun Raya 2;
3. Pintu Istana 1;
4. Pintu Istana Utama;
5. Depan Balaikota Bogor.

Tujuan 1.1. : Peningkatan kualitas *smart government*

Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya integrasi data sistem informasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Integrasi Data SIM	18,45%	18,45%	100%

Integrasi data merupakan kemampuan sebuah aplikasi atau sistem untuk dapat berbagi data dengan aplikasi/sistem lain demi mewujudkan peningkatan kualitas data dan efisiensi kinerja perangkat daerah. Proses integrasi sistem ini dilakukan melibatkan beberapa kegiatan di antaranya pengembangan datawarehouse kota bogor sebagai gudang datanya dan pengembangan aplikasi SIMATA sebagai media penampil hasil olahan datanya.

Sampai dengan tahun 2018, Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor telah mengintegrasikan sebanyak 19 (sembilan belas) SIM dari 40 (empat puluh) SIM total aplikasi yang dapat diintegrasikan, sebesar 18.45% (delapan belas koma empat puluh lima persen) dari total seluruh Aplikasi yang terdapat di Kota Bogor.

Selama tahun 2018 dilakukan penambahan integrasi data dari 3 (tiga) SIM yaitu SISLAPPBJ, SIM PBB, dan Datawarehouse Kota Bogor. Proses Integrasi dilakukan dengan aplikasi Sistem Pemantauan Kota (SIMATA) dengan melakukan koneksi via webservice.

Data yang dikirimkan oleh SISLAPPBJ antara lain Rekap data lelang selama tahun 2018, Rekapitulasi Paket, Rekap Paket SPSE Kota Bogor. Data yang diintegrasikan dengan SIM PBB antara lain berupa data penerimaan pajak, pertumbuhan wajib pajak, dan jumlah pelayanan PBB. Sedangkan SIMATA mengambil data aplikasi lainnya dari datawarehouse kota Bogor.

Berikut daftar aplikasi yang telah terintegrasi sampai dengan tahun 2018 :

No	Nama SIM	Integrasi Dengan
1	SIMPEG	simata.kotabogor.go.id
2	SIMPUS	http://172.16.0.64/dashboard
3	SIM WILAYAH	http://172.16.0.64/dashboard
4	SMART	simata.kotabogor.go.id
5	SIL	simata.kotabogor.go.id
6	SIDAMENDEL	Ekstik, http://103.14.229.14
7	LKPP	Ekstik. http://103.14.229.14
8	WEB ASPIRASI	simata.kotabogor.go.id
9	PERTUMBUHAN WP	simata.kotabogor.go.id
10	DATA PENDAPATAN	simata.kotabogor.go.id
11	E-SURAT	http://172.16.0.64/dashboard
12	HIBAH BANSOS	simata.kotabogor.go.id
13	BAPPEDA	
14	SIMRAL	
15	SIM PERINDAG	
16	SIM PATEN	
17	SISLAPPBJ	
18	SIM PBB	
19	DATAWAREHOUSE	

MISI 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

Tujuan 2.1. : Pengembangan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase layanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait	65%	80,14%	100%

Layanan pengaduan masyarakat adalah aplikasi aspirasi online sebagai sarana untuk masyarakat Kota Bogor menyampaikan atau melayangkan aspirasi, saran, kritik, pengaduan, pertanyaan dan ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Pemerintah Kota Bogor kepada masyarakat. Layanan pengaduan masyarakat melalui Contact center disampaikan melalui nomor cantik : 150411, sms : 08118500411, email : aspirasi@kotabogor.go.id dan melalui twiter : @aspirasi_bogor.

Jenis pengaduan yang disampaikan bersifat umum, misalnya jalan rusak, gedung sekolah rusak, permintaan data, tuiuan wisata, rumah sakit, alamat kantor pemerintah, dan lain-lain.

Jumlah pengaduan yang diterima selama tahun 2018 sebanyak 559 (lima ratus lima puluh sembilan) pengaduan, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) atau 80,14% (delapan puluh koma empat belas persen) dan yang belum mendapat tindaklanjut sebanyak 111 (seratus sebelas) atau 19,86% (sembilan belas koma delapan puluh enam persen).

Berikut data rekap pengaduan masyarakat per perangkat daerah dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Rekap Aspirasi Pengaduan Masyarakat Per Perangkat Daerah

NO	PENGADUAN	JUMLAH	%	KETERANGAN	DITINDAK LANJUTI	BELUM DITINDAK LANJUTI
1	Kedisiplinan Pegawai	0	0.00%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	0	0
2	Kebakaran, Longsor	0	0.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0
3	Pajak Reklame	1	0.18%	Badan Pendapatan Daerah	0	1
4		0	0.00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	0	0
5		1	0.18%	Badan Perencanaan	0	1

NO	PENGADUAN	JUMLAH	%	KETERANGAN	DITINDAK LANJUTI	BELUM DITINDAK LANJUTI
				Pembangunan Daerah		
6		0	0.00%	Bagian Hukum Dan HAM	0	0
7	Insentif Guru Ngaji	1	0.18%	Bagian Humas	0	1
8		0	0.00%	Bagian Kemasyarakatan	0	0
9		0	0.00%	Bagian Keuangan Sekretariat	0	0
10		0	0.00%	Bagian Organisasi	0	0
11	Izin rumah yang dijadikan tempat usaha	0	0.00%	Bagian Adm. Pemerintahan	0	0
12		0	0.00%	Bagian Addalbang PBJ	0	0
13		0	0.00%	Bagian Perekonomian	0	0
14	Sarana Peribadatan	0	0.00%	Bagian Umum	0	0
15		0	0.00%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip	0	0
16	Persampahan	17	3.04%	Dinas Lingkungan Hidup	10	7
17	Blangko KTP dan KK	33	5.90%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30	3
18	Rujukan yang ditolak, meminta adanya fogging	12	2.15%	Dinas Kesehatan	8	4
19	Penelitian konsumsi sayur dan buah di Bogor	0	0.00%	Dinas Ketahanan Pangan	0	0
20	Bus Pariwisata	0	0.00%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0	0
21	Perbaikan Drainase	33	5.90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30	3

NO	PENGADUAN	JUMLAH	%	KETERANGAN	DITINDAK LANJUTI	BELUM DITINDAK LANJUTI
22		0	0.00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	0	0
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	0	0.00%	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0	0
24	Pengurusan Perizinan	6	1.07%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1
25	Pemungutan Biaya Sekolah	6	1.07%	Dinas Pendidikan	0	6
26		0	0.00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0
27	Kemacetan dan Trotoar	52	9.30%	Dinas Perhubungan	30	22
28	Kelangkaan Gas Bersubsidi	1	0.18%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	1
29		0	0.00%	Dinas Pertanian	0	0
30	RTLH	0	0.00%	Dinas Perumahan dan Permukiman	0	0
	Pencemaran, Perusakan Taman, PJU dan Jalan Lingkungan	23	4.11%	Dinas Perumahan dan Permukiman	12	11
31	Pengemis, Pengamen, Anjal	1	0.18%	Dinas Sosial	0	1
32	Informasi Lowongan Kerja	0	0.00%	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	0	0
33	Tower dan Web Aspirasi Yang Eror	0	0.00%	Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	0	0
34	Transparansi Anggaran	0	0.00%	Inspektorat	0	0
35		0	0.00%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor	0	0
36	Pengembang Investasi	0	0.00%	Kantor Koperasi dan UMKM	0	0
37	Sulit untuk Meminta Surat Pengantar	4	0.72%	Kecamatan Bogor Barat	0	4
38	Sulit untuk Meminta Surat Pengantar	2	0.36%	Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	0	2

NO	PENGADUAN	JUMLAH	%	KETERANGAN	DITINDAK LANJUTI	BELUM DITINDAK LANJUTI
39	Sulit untuk Meminta Surat Pengantar	2	0.36%	Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	0	2
40	Sulit untuk Meminta Surat Pengantar	1	0.18%	Kecamatan Bogor Timur	0	1
41	Sulit untuk Meminta Surat Pengantar	2	0.36%	Kecamatan Bogor Utara	0	2
42	Sulit untuk Meminta Surat Pengantar	1	0.18%	Kecamatan Tanah Sareal	0	1
43		0	0.00%	KORPRI	0	0
44		0	0.00%	KPUD	0	0
45		0	0.00%	PD Bank Pasar	0	0
46	Ketidaknyamanan Di Bis PDJT	1	0.18%	PD Jasa Transportasi	0	1
47	Pungli Terhadap Pedagang	0	0.00%	PD Pasar Pakuan Jaya	0	0
48	Pelayanannya yang Berbelit	3	0.54%	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor	0	3
49	PKL dan Psr anyar yang semrawut	31	5.55%	Satuan Polisi Pamong Praja	2	29
50		0	0.00%	Sekretariat Daerah	0	0
51		0	0.00%	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	0	0
52		0	0.00%	Sekretariat DPRD	0	0
53		0	0.00%	Sekretaris KPUD	0	0
54		0	0.00%	Staff Ahli	0	0
55	Menanyakan PLN	88	15.74%	PLN	88	0
56	Menanyakan PDAM	10	1.79%	PDAM	10	0
57	Menanyakan Kabupaten, Alamat, dll	227	40.61%	Lainnya	223	4
	JUMLAH	559	100.00%		448	111

Tujuan 2.2. : Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas	B	BB	
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor diperoleh berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja.

Untuk setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan ditindaklanjuti sesuai arahan dalam rekomendasi.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi Informatika.

Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tahun 2018 yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dan sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada Anggaran Belanja Langsung maupun Anggaran Belanja Tidak Langsung.

Secara keseluruhan target belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tahun 2018 setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp18.138.296.783,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung,

terrealisasi Rp17.470.651.524,00 (tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) atau 96,32% (sembilan puluh enam koma tiga puluh dua persen) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Target **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp6.668.625.983,00 (enam milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) terealisasi Rp6.545.166.287,00 (enam milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 98,15% (sembilan puluh delapan koma lima belas persen);
- b. Target **Belanja Langsung** sebesar Rp11.469.670.800,00 (sebelas milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) terealisasi Rp10.925.485.237,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 95,26% (sembilan puluh lima koma dua puluh enam persen).

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Belanja Tidak Langsung	6.668.625.983	6.545.166.287	98,15%
Belanja Langsung	11.469.670.800	10.925.485.237	95,26%
Jumlah	18.138.296.783	17.470.651.524	96,32%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor merupakan dokumen yang menggambarkan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor selama tahun 2018 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja tahun 2018.

Dari 5 (lima) sasaran yang akan dicapai dengan target indikator yang telah ditetapkan semuanya telah diukur dan dievaluasi capaiannya seperti yang telah dijabarkan dalam laporan ini. Pencapaian itu dihasilkan melalui perhitungan antara persentase nilai capaian dengan indikator kinerja sasaran.

Sasaran yang telah dicapai dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan operasional untuk mencapai tujuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dengan meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta layanan pengaduan dan aspirasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai langkah awal menuju Bogor sebagai *Smart City*.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tahun 2018 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas pencapaian sasaran kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2015-2019 sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja tahun 2018 dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik di tahun anggaran selanjutnya untuk pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor.